



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6606-6617

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi

Nidia Agustin^{1✉}, Andi Mulyadi², M. Rijal Amirulloh³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: nidiaagustin26@ummi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Infrastruktur jalan memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu di Kabupaten Sukabumi merupakan jalur strategis yang kondisinya mengalami kerusakan signifikan, mengancam keselamatan pengguna dan menghambat aktivitas ekonomi. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan jalan tersebut. Penelitian ini menganalisis peran Dinas PU dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur Jalan Pangleseran-Cibatu, termasuk strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kondisi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas PU telah melakukan upaya perbaikan, namun keterbatasan anggaran, kondisi cuaca, dan tingginya intensitas lalu lintas menjadi hambatan utama dalam pemeliharaan jalan. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, perencanaan yang lebih efektif, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemeliharaan Jalan, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Sukabumi

Abstract

Road infrastructure plays a vital role in supporting community mobility and regional economic growth. The Pangleseran-Cibatu Road section in Sukabumi Regency is a strategic route whose condition has experienced significant damage, threatening the safety of users and hampering economic activities. The Public Works (PU) Agency of Sukabumi Regency, through the relevant Regional Technical Implementation Unit (UPTD), is responsible for the maintenance and repair of the road. This study analyzes the role of the PU Agency in the maintenance and repair of the Pangleseran-Cibatu Road infrastructure, including the strategies implemented, challenges faced, and their impact on road conditions. The results of the study indicate that although the PU Agency has made repair efforts, budget constraints, weather conditions, and high traffic intensity are the main obstacles in road maintenance. Improved coordination between agencies, more effective planning, and community participation are needed to ensure the sustainability and quality of road infrastructure in Sukabumi Regency.

Keywords: Road Infrastructure, Road Maintenance, Public Works Department, Sukabumi Regency

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan komponen penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan sosial-ekonomi suatu wilayah. Sebagai salah satu bentuk realisasi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor krusial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menggariskan bahwa negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap infrastruktur jalan yang layak. Salah satu ruas jalan strategis yang menjadi perhatian adalah Jalan Pangleseran-Cibatu di Kecamatan Cikembar. Ruas jalan ini memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Namun, kondisi jalan tersebut sering kali mengalami kerusakan parah, seperti dilaporkan oleh SukabumiZone pada 10 Januari 2024. Kerusakan ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan tetapi juga menyebabkan gangguan mobilitas yang berdampak pada peningkatan waktu tempuh, risiko kecelakaan lalu lintas, dan kerugian ekonomi.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016, bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan. Melalui bidang Bina Marga,

Dinas PU menjalankan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program pemeliharaan jalan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jalan tetap layak guna, aman, dan nyaman bagi pengguna.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah ini. Salah satunya adalah proses teknis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Proses tersebut meliputi perencanaan berbasis survei lapangan, penentuan prioritas jalan yang membutuhkan perbaikan, hingga pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, cuaca, dan tingginya intensitas lalu lintas menjadi hambatan utama dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan.



Diagram 1. 1 Ruas Jalan Beserta Kondisi Jalan Kecamatan Cikembar 2021-2023
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi)

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa ruas jalan pangleseran-cibatu di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam kondisi jalan diantaranya, kondisi baik, sedang, dan rusak. Pada tahun 2021, kondisi jalan sebagian besar berada dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 55,7%. Kondisi baik memiliki persentase sebesar 15,7%, sedangkan rusak berada pada 14,5%. Selanjutnya pada tahun 2022, terlihat peningkatan dalam kondisi baik yang mencapai 22,37%. Persentase kondisi sedang juga meningkat menjadi 69,53%, sementara kondisi rusak menurun menjadi 7,89%. Sedangkan pada tahun 2023, kondisi baik menurun drastis menjadi 9,36%, dan kondisi rusak meningkat kembali menjadi 16,05%. Dari hal diatas pentingnya peran

dari semua pihak khususnya peran dari Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.

Fenomena masalah yang terjadi saat ini mengenai kerusakan jalan yaitu, di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Salah satu ruas jalan rusak yang belum mendapatkan pemeliharaan dan perbaikan. Dimana wilayahnya masih banyak mempunyai ruas jalan yang rusak, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga merugikan masyarakat. Sebagaimana penemuan-penemuan data skunder yang peneliti dapatkan dari SUKABUMIZONE, 10/01/2024, bahwasannya ruas Jalan Raya Cibatu-Pangleseran rusak parah, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Dibuktikan pada gambar dibawah:



Gambar 1. 1 Kerusakan Ruas Jalan Raya Pangleseran Kabupaten Sukabumi
(Sumber: SUKABUMIZONE, 2024)

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa ruas Jalan Raya Pangleseran-Cibatu kian memperhatikan, jalan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ini selain berlubang juga kerap dipenuhi lumpur dan kubangan air yang begitu besar. Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi para pengguna jalan yang melintas.

Kerusakan jalan yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Polres Sukabumi, sepanjang tahun 2023 terjadi 68 kasus kecelakaan lalu lintas, meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar insiden tersebut disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk, termasuk lubang-lubang di jalan yang tidak tertangani dengan baik.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas pemeliharaan dan

perbaikan jalan, khususnya di ruas Jalan Pangleseran-Cibatu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi, implementasi, dan dampak dari kebijakan Dinas PU dalam mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dilihat dari latar belakang diatas, fokus masalah dari penelitian ini adalah Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi. Maka peneliti mengambil permasalahan atau rumusan masalah "Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi?".

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian yang berjudul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Pangleseran-Cibatu Kabupaten Sukabumi", peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya "Research Design" (2016:4-5), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses ini melibatkan pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif, dan penafsiran makna data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial terkait peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan, berdasarkan pandangan para partisipan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Pasanggrahan No. 03, Desa Cimanggu, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Subjek penelitian meliputi Ketua Bidang Bina Marga, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Kabupaten, dan masyarakat sebagai target kebijakan. Pemilihan subjek didasarkan pada peran dan tanggung jawab mereka dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan partisipan,

menggunakan pertanyaan terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini mereka. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen publik dan pribadi yang relevan dengan penelitian. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui model alir yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles & Huberman (2014:18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan ini peneliti mendeskripsikan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan dengan informan, berdasarkan dengan model teori peran menurut Arimbi, (2003:45) yang mempunyai lima dimensi yaitu peran sebagai alat kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Selain itu penelitian ini didukung dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016 PERMEN Pekerjaan Umum RI No 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.

Peran Sebagai Alat Kebijakan

Peran sebagai alat kebijakan yang dijelaskan oleh Arimbi merujuk pada bagaimana kebijakan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan dipandang sebagai instrumen yang dirancang dan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengarahkan, mengatur, atau mendorong perilaku tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk pada ruas jalan Pangleseran-Cibatu. Peran ini meliputi perencanaan yang komprehensif, penganggaran yang efisien, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas jalan tetap terjaga. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Dinas PU menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan

Implementasi kebijakan pemeliharaan jalan melibatkan berbagai pihak, antara lain Bupati sebagai pemberi arahan kebijakan umum dan penganggaran, Dinas PU yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) yang merumuskan rencana pembangunan infrastruktur, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang menetapkan alokasi dana. Selain itu, kontraktor pemeliharaan jalan, masyarakat pengguna jalan, kepala desa atau lurah, kepolisian, Dinas Perhubungan, instansi lingkungan hidup, dan Inspektorat Daerah juga berperan dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas PU menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kerusakan jalan akibat faktor alam dan cuaca ekstrem, serta masalah sosial yang timbul selama proses pemeliharaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perencanaan yang tepat, penganggaran yang efisien, pengawasan dan evaluasi berkala, serta kolaborasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan

Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi adalah konsep yang menunjukkan bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan peran mereka untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks komunikasi, interaksi sosial, maupun manajemen situasi. Dalam hal ini, peran tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang statis atau sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai alat yang dinamis dan fleksibel untuk memengaruhi, beradaptasi, dan menghadapi tantangan dalam suatu sistem sosial atau organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Tugas pokok mereka meliputi pembangunan, peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. (Purnama, Resmawan & Budiman, 2018)

Dalam perencanaan, Dinas PUPR bertanggung jawab menyiapkan dan mengumpulkan bahan serta data untuk menyusun program tahunan pembangunan jalan dan jembatan. Mereka juga menghimpun dan menganalisis data terkait kondisi jalan dan jembatan untuk menentukan prioritas pembangunan dan pemeliharaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, yang mengakibatkan pemeliharaan rutin tidak selalu sesuai rencana. Selain itu, hambatan dalam waktu perencanaan dan banyaknya laporan kerusakan jalan yang masuk juga mempengaruhi efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan alokasi anggaran, koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, dan penerapan strategi pemeliharaan yang lebih proaktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan jalan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan jaringan jalan yang memadai. (Fatimah, adys & Rahim, 2021)

Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi adalah fungsi utama yang memungkinkan penyampaian informasi, ide, emosi, atau pesan antara individu atau kelompok. Alat komunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, visual, maupun teknologi, memainkan beberapa peran penting.

Dinas Pekerjaan Umum menerapkan berbagai strategi komunikasi untuk memastikan informasi proyek tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Strategi tersebut meliputi penggunaan media sosial dan situs web resmi untuk memberikan informasi terkini, sosialisasi langsung melalui pertemuan dengan warga, serta pemasangan papan informasi di lokasi proyek yang memuat detail pekerjaan, jadwal, dan kontak pengaduan. Selain itu, Dinas PU juga mengadakan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keselarasan informasi dan pelaksanaan proyek.

Dalam melibatkan masyarakat pada perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan, Dinas PU mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan informasi serta mendengarkan masukan dari warga. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan proyek untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan standar kualitas. Partisipasi aktif warga dalam program pemeliharaan berkelanjutan turut membantu menjaga kualitas jalan yang telah dibangun. Melalui keterlibatan ini, DPU meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dukungan publik terhadap proyek yang dilaksanakan.

Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran sebagai alat penyelesaian sengketa biasanya merujuk pada mekanisme, metode, atau lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Peran ini penting untuk menciptakan keadilan, mengurangi konflik berkepanjangan, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran strategis dalam menangani hambatan yang muncul selama pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur jalan. Peran tersebut meliputi identifikasi hambatan seperti masalah teknis, administratif, cuaca, atau anggaran, serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, kontraktor, dan masyarakat. Dinas PU juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah teknis, mengelola waktu dan sumber daya secara efektif, melakukan penyesuaian anggaran, serta menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat agar dampak gangguan lalu lintas dapat diminimalkan. Selain itu, evaluasi dan perbaikan proses dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di masa depan. Dengan pendekatan ini, Dinas PU berupaya memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan jalan berjalan sesuai harapan berkat perencanaan matang, pengawasan, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Meskipun sering kali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan cuaca ekstrem, Dinas PU terus berupaya menjaga kelancaran pekerjaan dan mencapai tujuan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Peran Sebagai Terapi

Peran sebagai terapi merujuk pada upaya untuk memberikan pemulihan, penyembuhan, atau perbaikan terhadap kondisi fisik, mental, emosional, atau sosial individu atau kelompok. Peran ini bertujuan untuk membantu seseorang mencapai keseimbangan atau kesehatan optimal. Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai "terapi" dapat diartikan dalam konteks memberikan solusi yang memperbaiki, menyembuhkan, atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, infrastruktur, atau kesejahteraan masyarakat.

Program pemeliharaan dan perbaikan jalan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan konektivitas, mobilitas, dan keselamatan. Jalan yang diperbaiki mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan distribusi barang dan jasa. Selain itu, kualitas jalan yang baik mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan nilai properti, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Program ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik ke fasilitas umum, pengurangan waktu perjalanan, serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan investasi. Dengan jalan yang lebih baik, masyarakat mendapatkan manfaat berupa pengurangan polusi debu, akses cepat ke layanan kesehatan, dan

peningkatan keselamatan melalui infrastruktur pendukung, seperti penerangan jalan. Program ini menjadi investasi jangka panjang yang mendukung ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain aspek fisik dan ekonomi, perbaikan jalan juga memperkuat jaringan sosial masyarakat. Kemudahan mobilitas mendorong interaksi lebih sering antarwarga, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Jalan yang lebih baik memfasilitasi solidaritas, partisipasi dalam kegiatan komunitas, dan respons terhadap keadaan darurat, terutama di wilayah terpencil. Dengan konektivitas yang meningkat, masyarakat menjadi lebih aktif, solid, dan terhubung, sehingga kualitas kehidupan sosial turut meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil simpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas, meningkatkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi sebagai alat kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi, Dinas PU telah menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat. Program-program pemeliharaan jalan berhasil memberikan dampak positif berupa peningkatan mobilitas, keselamatan, dan interaksi sosial, serta mendukung pemerataan pembangunan dan ekonomi daerah.

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, hambatan teknis, serta kondisi cuaca ekstrem. Dinas PU berhasil mengatasi sebagian besar hambatan tersebut melalui koordinasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Upaya ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi Heroepoetri, A. S. (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Creswell, J. W. (2017). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, adys & Rahim. (2021). Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. Journal Unismuh. Vol. 2 No. 4.

Jalan Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6
(1): 487-500

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.

Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

Purnama, Resmawan & Budiman. (2018), *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan*

Soekanto, S. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.